



Dirikan TPS di Empat Rumah Sakit

JOGJA - KPU Kota Jogja tak ingin ada pemilih yang tercecer pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli. Terutama pemilih hak suara yang sedang sakit maupun mereka yang beraktivitas di rumah sakit saat hari coblosan. Lembaga itu pun mengeluarkan kebijakan mendirikan tempat pemungutan suara (TPS) di rumah sakit.

▶ Baca Dirikan... Hal 11

Siap Tertibkan Pelanggaran APK

DIRIKAN...
Sambungan dari hal 1

Ada empat TPS yang akan didirikan di rumah sakit Kota Jogja. Yakni, PKU Muhammadiyah, RS Pantii Rapih, RS Bethesda, dan RS Ludiro Husodo.

"Lebih kepada efisiensi dan mengakomodasi pemilih, jangan sampai tercecer. Terpenting rumah sakit harus menyediakan daftar pemilih sehingga TPS bisa didirikan," terang Ketua KPU Kota Jogja Wawan Budianto saat rapat pleno tentang daftar pemilih tetap (DPT) di Hotel Gowongan Inn kemarin (9/6).

Dalam rapat pleno itu terungkap untuk sementara terdapat 108 TPS dengan jumlah pemilih 309.970 orang. Jumlah pemilih itu akan bertambah setelah data data pemilih di TPS PKU Muhammadiyah di Gondomanan sudah jelas.

Berdasar data KPU, terdapat 20 instansi yang mendapat perhatian khusus untuk disediakan TPS. Yakni, 18 rumah sakit, 1 rumah tahanan kota, dan 1 lembaga masyarakat. Hanya, tidak semua rumah sakit disediakan TPS.

Ketua Panwaslu Kota Jogja Agus Triyatno mengatakan, sesuai ketentuan seharusnya Senin (9/6) DPT untuk pilpres ditetapkan kemarin. Peraturan menyebutkan 30 hari menjelang coblosan KPU harus menetapkan DPT.

"Langkah KPU untuk mengakomodasi pemilih sudah baik jika dibandingkan pileg kemarin. Seharusnya KPU juga memperhatikan tahanan yang ada di Polsek untuk menggunakan haknya saat pilpres nanti," ucapnya.

Terpisah, Kepala Bagian Hukum Pemkot Jogja Basuki Hari Saksana menegaskan instansinya siap melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) pilpres. Menurut prinsip penertiban tidak jauh berbeda dengan pileg lalu. Penertiban melibatkan empat instansi yakni KPU Kota Jogja, Polresta Jogja, Panwaslu Kota Jogja, dan Dinas Ketertiban Pemkot Jogja.

"Yang beda dalam isi perwal penertiban APK untuk pilpres hanya eksekusinya saja. Tahun lalu tidak melibatkan KPU di lapangan. Saat ini sekarang wajib, empat unsur tersebut turun semua," terang Basuki di Balai Kota Jogja kemarin (9/6).

Terdengar Yel-Yel Jokowi
 Muncul dugaan Oxen Free, rumah makan di Sosrowijayan, Jogja, digunakan sebagai lokasi pemenangan pasangan capres dan cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Setidaknya hal itu muncul usai salah seorang warga yang tinggal berdekatan dengan rumah makan tersebut mendengar adanya yel-yel Jokowi pada Minggu (7/6).

Setiawan, warga di Jalan Sosrowijayan, menuturkan beberapa kali sempat mendengar Jokowi disebut-sebut oleh pengunjung di Oxen Free. Itu terjadi sekitar pukul 01.00.

"Pada saat lewat tengah malam terdengar yel-yel Jokowi. Itu istri saya yang mendengarnya langsung," kata Setiawan.

Hal ini semakin memperkeruh kondisi lingkungan di sekitar Oxen Free. Apalagi, lanjut Setiawan, Oxen Free telah mendapatkan surat peringatan dari dinas terkait lantaran pernah menjual minuman keras.

Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja sempat mengeluarkan pernyataan agar Pemkot Jogja melakukan pertemuan dengan warga sekitar dengan di fasilitasi Forpi. "Harusnya kan Forpi ikut mendesak Pemkot Jogja agar segera menutup lokasi itu. Karena menyalahgunakan izin," ujarnya.

Forpi sendiri dalam hal ini tetap masih menunggu respon dari Pemkot tentang adanya salah satu warga yang keberatan dengan aktifitas yang ada di Oxen Free. Forpi tidak bisa memaksakan Pemkot untuk melakukan tindakan lanjut dari laporan warganya.

"Kapasitas kita juga tetap menunggu respons dari pemkot. Kita tidak punya kewenangan untuk mendendaknya," kata anggota Forpi Kota Jogja Baharudin Kamba.

Adapun ketika nanti keinginan Forpi memfasilitasi mediasi antara Pemkot, warga sekitar dan pengelola Oxen Free, tentu hal itu bertujuan agar tidak terjadi konflik sosial. Selain itu, lanjut Bahar, persoalan ini juga tetap memperhatikan asas keadilan.

Terkait dugaan Oxen Free digunakan sebagai basis dukungan Jokowi-JK, Ipung Purwandari selaku RW 02 Sosrowijayan Wetan, menegaskan hal itu sangat tidak logis. Tidak ada dasarnya jika lokasi itu digunakan sebagai wadah kampanye.

"Saya tegaskan tidak ada. Nggak masuk akal itu. Oxen Free itu rumah makan, bukan tempat kampanye," tegasnya.

Saat disinggung mengenai perizinan, Oxen Free juga telah menempuh sesuai regulasi yang berlaku di Kota Jogja. Termasuk saat lokasi itu akan dibuka untuk rumah makan, warga sekitar juga telah mengetahui dan menyetujui dibukanya Oxen Free sebagai rumah makan.

"Kalau musik, memang bertujuan agar pengunjung nyaman. Apalagi Malioboro sebagai ikon Jogja. Warga juga sudah tahu soal itu, mereka tidak masalah, ujarnya.

Ia berharap agar persoalan ini tidak menjadi konflik sosial. Apalagi selam ini keberadaan Oxen Free juga memperhatikan regulasi yang berlaku. Selain itu, banyak keuntungan untuk masyarakat salah satunya lahan parkir yang secara tidak langsung membantu perkonomian warga sekitar. (fid/hrp/ila/amd/gp)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
KPU Kota Yagya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005